

## DAFTAR ISI

1. *Public Private Community Partnership* dalam Pembangunan Terminal Transit Paso Kota Ambon  
**MIKE J. ROLOBESSY** \_\_\_\_\_ **1-15**
2. Peran Komunikasi dan Penggunaan Media Massa pada Kelompok Peternak Sapi di kabupaten Maluku Tenggara  
**VRANSISCA KISSYA** \_\_\_\_\_ **16-30**
3. Rezin Politik dan Problem Pembangunan di Indonesia  
**NURAINY LATUCONSINA** \_\_\_\_\_ **31-41**
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah  
**ISRA MUKSIN** \_\_\_\_\_ **42-50**
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah  
**YUDI DE FRETES** \_\_\_\_\_ **51-60**
6. “Perilaku Masyarakat Terhadap Budaya Hidup Bersih” (Studi Kasus Pada Masyarakat Negeri Batu Merah Kampung RT 03 / RW 03Kecamatan Sirimau Kota Ambon).  
**BAHRUDIN HASAN** \_\_\_\_\_ **61-70**
7. Program Jamkesmas di Puskesmas Tomalehu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)  
**ILYAS IBRAHIM** \_\_\_\_\_ **71-80**
8. Penegakan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik yang Berkualitas Di Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
**HEIN EDUARD SIMATAUW** \_\_\_\_\_ **81-90**
9. Efektifitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2dtk) Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah  
**SITI GAIF NINGKEULA** \_\_\_\_\_ **91-106**
10. Analisa Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual  
**LUSIA RENTANUBUN** \_\_\_\_\_ **107-139**
11. Peran Institusi Lokal dalam Mencegah Konflik Sosial antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Waihatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat  
**ISHAKA LALIHUN** \_\_\_\_\_ **140-166**

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) DI KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Oleh : Siti Gaif Ningkeula\*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program P2DTK di Kecamatan Leihitu, lokasi penelitian di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Dengan sampel penelitian yang diambil secara purposive sampling atau penarikannya difokuskan pada kelompok pemuda dari seluruh desa dalam wilayah kecamatan Leihitu yang dilibatkan sebagai penanggungjawab pelaksana program.

Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dan kuisioner kemudian dianalisis menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Program (P2DTK) di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah masih kurang efektif atau belum sesuai dengan harapan masyarakat, yang dianalisis melalui beberapa indikator yakni; Pemahaman sumber daya pelaksana kegiatan P2DTK, Kemampuan mengkomunikasikan kegiatan P2DTK, Keaktifan masyarakat dalam merencanakan P2DTK, serta kemampuan merealisasikan program P2DTK. Dapat dikatakan bahwa; faktor sumber daya, dukungan masyarakat, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan merealisasikan program sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program P2DTK. Selanjutnya efektifitas program dapat dilaksanakan lebih optimal apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah khususnya Pemerintah Kecamatan Leihitu memberikan petunjuk teknis serta memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat sehingga dapat memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program P2DTK.

Kata Kunci: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

### A. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pembangunan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan yang secara realistis menunjukkan peningkatan sekalipun dikalim pemerintah telah mengalami penurunan. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan maka perlu ditingkatkan kualitas hidupnya.

---

\* Dosen Prodi Administrasi Negara STIA Alazka, Ambon

Sejalan dengan itu, perlu dikembangkan suasana yang membangkitkan peran dari seluruh masyarakat secara efektif dan dinamis dalam pembangunan. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang dan telah menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.

Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan percepatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental masyarakat.

Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan dalam berbagai kegiatan efektif yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, hendaknya dilaksanakan secara terarah pada suatu penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pengatur, pendorong dan penyedia. (Soewarto Hadi, 1999).

Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, sebagai gambaran umum kondisi masyarakat pasca krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, menunjukkan terjadinya peningkatan masyarakat miskin yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat di daerah tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan (pangan), pakaian (sandang), pendidikan, kesehatan dan perumahan. Berkembangnya fenomena kemiskinan akibat krisis yang berkepanjangan membutuhkan intervensi pemerintah yang komprehensif secara efektif. Hanya dengan cara itu dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.

Dalam rangka melengkapi berbagai program atau proyek penanggulangan kemiskinan lainnya, dirumuskan program percepatan pembangunandaerah tertinggal dan khusus (PD2TK) yang menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment), sebagai suatu syarat menuju percepatan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) (Inayatullah, Sadikin, 2004). P2DTK dirancang dengan pengertian bahwa untuk efektif menanggulangi daerah tertinggal secara berkelanjutan diperlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, sehingga perlu upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri.

P2DTK merupakan prakarsa dan upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mengatasi persoalan wilayah tertinggal. Secara umum, kebijaksanaan P2DTK pada dasarnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap krisis moneter dan ekonomi, tetapi juga bersifat strategis guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan memiliki otonomi dalam pembangunan. P2DTK memadukan beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program-program percepatan pembangunan, khususnya yang diselenggarakan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah agar tidak ketinggalan dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu kelebihanannya adalah dari sisi kesiapan manual dan instrumen di lapangan. Manual yang disajikan sangat rinci dan database program juga relatif baik. P2DTK dianggap tepat karena masyarakat sendiri harus berperan lebih besar dan lebih aktif dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap paling bermanfaat. P2DTK sebagai program khusus dalam percepatan pembangunan di daerah tertinggal memang memberi sebuah harapan besar. Harapan bagi terhapusnya kemiskinan dan harapan akan majunya pembangunan suatu wilayah.

Menurut Menkokesra, Surat Keputusan Nomor 23/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 bahwa P2DTK merupakan program atau kegiatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat, yang kegiatannya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dimana dalam hal ini efektivitas pelaksanaan program P2DTK yaitu melaksanakan proyek fisik yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat strategis.

Pelaksanaan P2DTK yang terjadi saat ini terlihat belum terlaksana secara efektif. Wujud belum efektifnya pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari aspek input, process dan output yang dihasilkan belum terlaksana sesuai dengan perencanaan program yang ditetapkan, belum sesuai dengan peruntukan yang diharapkan, komposisi anggaran yang belum teralokasikan dengan baik, proses yang belum terdepresiasi berdasarkan fungsi, pengorganisasian yang belum rasional diterapkan dengan baik, dan orientasi tujuan dari program ini belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan P2DTK yang terlihat dari efektifitas aspek input belum memberikan kontribusi besar terhadap kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan input dari P2DTK berupa masih belum tersosialisasikannya kebijakan pemerintah dengan baik, yang berkaitan dengan program P2DTK, masih ditemukan adanya berbagai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang belum terealisasi sesuai yang diharapkan, khususnya yang berkaitan dengan daerah miskin yang tertinggal, belum adanya penggunaan kompensasi anggaran yang tepat sasaran sesuai dengan alokasi anggaran yang digulirkan, yang hal ini menjadi penyebab pelaksanaan P2DTK kurang efektif.

Dilihat dari efektifitas aspek proses pelaksanaannya belum teraplikasikan berdasarkan fungsi dari berbagai kegiatan program pembangunan, proses pengorganisasian yang belum rasional diterapkan dengan baik, proses pengkoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan belum terproses dengan optimal atas berbagai tindakan pelaksanaan P2DTK yang kurang efektif, termasuk pula apabila dilihat dari efektifitas aspek output yang dihasilkan, pelaksanaan P2DTK belum menghasilkan hasil pembangunan yang adil dan merata diterapkan di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan orientasi tujuan dari program yang dilaksanakan, baik dilihat dari hasil secara fisik maupun dilihat dari pemberdayaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan P2DTK di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

P2DTK adalah program percepatan pembangunan suatu wilayah dengan pendekatan utama masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Dengan upaya pendekatan percepatan pembangunan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memperbaiki kondisi wilayah daerah tertinggal.

Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan dalam berbagai kegiatan efektif yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kebijakan pemerintah dalam Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang membutuhkan adanya efektivitas pelaksanaan di dalam menanggulangi pengentasan kemiskinan. Kecamatan Leihitu yang memiliki 13 desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan, diperlukan adanya pelaksanaan program P2DTK secara efektif sehingga tujuan pemerintah melalui program ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Karena itu, Ekowati (2005:36) menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pemahaman tentang efektivitas kegiatan, di mana kita harus menyederhanakan pengertian dan dilakukan secara break down (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip. Ini berarti efektivitas kegiatan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi adanya interaksi banyak faktor yang bertujuan untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi dan menjelaskan mengapa faktor-faktor yang muncul sebagai sarana evaluasi kebijakan.

a. Pemahaman sumber daya pelaksana kegiatan P2DTK

Sumberdaya merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan pemerintah dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan sumberdaya perlu dikomunikasikan secara transparan dan akurat serta dituntut adanya tingkat pertanggungjawaban dalam mengembangkan suatu aktivitas sumberdaya baik sumberdaya manusia, sumberdaya aset dan sumberdaya keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Ekowati (2005:37) menyatakan pentingnya sumberdaya meliputi ukuran staff dan perlu keahlian, informasi relevan dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (meliputi bangunan, sarana prasarana, tanah dan supply) yang digunakan untuk memberikan pelayanan.

Sumberdaya merupakan faktor pendukung dan penghambat. Apabila ketersediaan sumberdaya berupa fasilitas fisik dan non fisik atau material dan non material yang dapat digunakan dalam menjalankan suatu proses kegiatan yang terencana dan terarah akan memberikan dampak yang proporsional terhadap efektivitas kegiatan tersebut. Suatu efektivitas kegiatan tidak dapat mengabaikan adanya sumberdaya.

Subyono (2005:85) menyatakan bahwa faktor sumberdaya merupakan faktor yang berperan penting di dalam melakukan suatu efektivitas kegiatan pemerintah, dengan memanfaatkan sumberdaya, maka diperoleh adanya potensi penggerak yang sangat berperan penting dalam kegiatan pembangunan. Seperti adanya partisipasi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pementapan pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam memperkuat sumberdaya untuk efektivitas kegiatan pemerintah.

Kaitannya dengan pelaksanaan program P2DTK, hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya dalam hal ini adalah adanya masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam andil partisipasinya terhadap kegiatan pembangunan, dengan berupaya untuk menjadi potensi penggerak sesuai dengan aktivitas kerjanya, sehingga diperlukan adanya penciptaan lapangan kerja melalui suatu proses peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan program implementasi kebijakan pembangunan.

Banyak implementor mempertimbangkan kebijaksanaan dalam efektivitas kegiatan pemerintah. Salah satu alasan melakukan implementasi ini untuk merumuskan kebijakan yang strategis dengan tujuan pembangunan. Salah satu alasan implementasi suatu kebijakan adalah ingin mengembangkan suatu disposisi atau sikap masyarakat dalam ikut merumuskan suatu evaluasi

kebijakan. Menurut Ekowati (2005:38) menyatakan disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan efektivitas kegiatan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak

Pentingnya faktor disposisi atau perilaku dalam kegiatan pembangunan, yang berkaitan dengan efektivitas kegiatan pemerintah adalah adanya suatu sikap dan tindak lanjut untuk mengembangkan suatu program kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, termasuk salah satu contoh adalah efektivitas kegiatan pemerintah mengenai program P2DTK. Keberhasilan pelaksanaan program P2DTK ini banyak ditentukan oleh adanya faktor disposisi atau perilaku di dalam mengimplementasikan suatu program pembangunan.

b. Kemampuan mengkomunikasikan kegiatan P2DTK.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah yang dapat dilakukan. Sesungguhnya efektivitas kegiatan harus diterima secara jelas, akurat dan konsisten. Ekowati (2005:37) menyatakan bahwa tidak cukup hanya komunikasi yang diberikan kepada implementor dalam menyampaikan suatu informasi mengenai pembangunan, tetapi harus dikomunikasikan secara transparan, dengan orientasi tujuan yang jelas mengarahkan implementasi lebih kreatif dan lebih berfokus pada konsistensi komunikasi yang mendukung suatu kebijakan diterapkan dengan baik, sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penerapan implementasi pembangunan, komunikasi sangat dibutuhkan, dan menjadi faktor yang dapat mendukung dan dapat menghambat. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, secara transparan, tidak menimbulkan adanya berbagai penafsiran atau berbagai multi kepentingan dari trik-trik pengkomunikasian, menyebabkan komunikasi menjadi faktor yang sangat mendukung suatu efektivitas kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya apabila dalam menerapkan efektivitas kegiatan



dilaksanakan dengan komunikasi yang salah, menimbulkan adanya kesalahpahaman dan memberikan penafsiran yang tidak sesuai antara fakta, data dan kenyataan yang ada akan menjadi bumeran suatu efektivitas kegiatan pembangunan.

Adapun implementasi komunikasi yang menjadi hal yang sering merugikan dalam pelaksanaan program P2DTK adalah komunikasi program, komunikasi permasalahan, komunikasi kegiatan dan komunikasi tindak lanjut. Setiap implementasi ini harus jelas aspek-aspek pengkomunikasiannya agar dapat menjadi faktor yang menunjang. Jika tidak akan menjadi penghambat dari suatu evaluasi kebijakan.

c. Keaktifan masyarakat dalam merencanakan P2DTK.

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembangunan di daerah tertinggal, yang bertujuan agar nantinya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri keluar dari belenggu kemiskinan.

P2DTK adalah program percepatan pembangunan suatu wilayah dengan pendekatan utama masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Dengan upaya pendekatan percepatan pembangunan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memperbaiki kondisi wilayah daerah tertinggal.

Program P2DTK diarahkan kepada kegiatan dalam kerangka penguatan kelembagaan di wilayah tertinggal dengan melakukan pelatihan-pelatihan, mendorong hidupnya kembali lembaga-lembaga formal/informal yang ada dalam masyarakat serta mendorong masyarakat untuk menggali /mengenali potensi dan permasalahannya serta tingkat kemiskinan di wilayah masing-masing, sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat menemukan sendiri berbagai permasalahannya sendiri, sehingga masing-masing diharapkan mampu sendiri merencanakan/ merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Adapun visi P2DTK yang diemban adalah "Terwujudnya masyarakat madani, yang maju dan sejahtera, dalam wilayah yang sehat, produktif, dan lestari. Sedangkan misi P2DTK adalah "membangun masyarakat mandiri yang mampu menjamin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

d. Kemampuan merealisasikan P2DTK sesuai rencana yang ditetapkan

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Steers (1985:2) menyatakan efektivitas tidak terlepas dari keberadaan serangkaian kegiatan/program kerjayang, senantiasa menjadi pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam suatu organisasi.

Kriteria efektivitas dapat dinilai dan dilihat dari keefektifan itu sendiri menurut dimensi waktu (Suwanto, 1999 : 11), dibagi atas ukuran waktu sebagai berikut :

- a. Jangka Pendek, ialah kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau lebih.
- b. Jangka Menengah, ialah kriteria yang ditetapkan apabila menilai keefektifan seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama (misalnya lima tahun).
- c. Jangka Panjang, ialah kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang tak terbatas.

Sumantri (2006:49) menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan yang sesuai dengan tindakan manajemen administratif adalah melaksanakan segala tindakan tersebut secara sistematis, konsisten, kompleks dan efektif. Atas dasar ini maka perlu adanya suatu kaidah mengenai konsep efektivitas yang sesungguhnya yaitu terwujudnya suatu kondisi yang sesuai dengan penerapan manajemen.

Efektivitas yang sesuai dengan penerapan fungsi manajemen adalah suatu tindakan yang mudah, menarik perhatian, memberikan inspirasi, memiliki fungsi

dalam menemukan berbagai tindakan, memiliki esensi yang jelas, fleksibel dan saling terkait. West-Burnham (1997:102) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu tindakan yang dilakukan dari serangkaian program yang sesuai dengan spesifikasi, terukur, bermanfaat, dapat diwujudkan dan memiliki batasan yang jelas, sehingga kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai target yang ingin dicapai. Reskianto (2003:165) suatu pelaksanaan kegiatan sering diperhadapkan oleh adanya batasan mengenai konsep efektif dan tidak efektif. Suatu kegiatan yang efektif adalah kegiatan yang memiliki penerapan manajemen yang sesuai dengan fungsi manajemen. Karena itu, diperlukan adanya suatu koordinasi yang utuh untuk menghasilkan efektivitas individu, kelompok dan organisasi dalam mencapai target.

Penelitian ini mengambil lokasi pada Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling atau penarikannya difokuskan pada kelompok pemuda dari seluruh desa dalam wilayah kecamatan Leihitu yang selalu dilibatkan sebagai penanggungjawab pelaksana program ini ditingkat kecamatan. Atas dasar itu maka setiap desa yang berada di kecamatan ini yakni sebanyak 13 desa akan diambil secara purposive sampling dari unsur pemerintah desa dan unsur tokoh pemuda serta unsur pengelola kegiatan P2DTK. Jika diperincikan kondisi sampel penelitian ini, akan terlihat sebagai berikut: Sebanyak 1 orang Kepala Desa/Raja dan 1 orang Sekretaris Desa dari 13 Desa di Kecamatan Leihitu sehingga seluruhnya berjumlah 26 orang. Sebanyak 2 orang tokoh masyarakat dan pemuda mewakili 13 desa di Kecamatan Leihitu sehingga seluruhnya berjumlah 26 orang. Sebanyak 3 orang pengelola kegiatan P2DTK yang ada di Kecamatan Leihitu. Dengan demikian maka jumlah sampel dalam penelitian ini secara keseluruhannya adalah sebanyak 55 orang.

Data-data yang dikumpulkan kemudian diproses dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni, dengan menghasilkan data analisis dengan bantuan tabel frekuensi, dimana apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan untuk selanjutnya dicermati dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## B. PEMBAHASAN

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembangunan di daerah tertinggal. Dan P2DTK merupakan program pemerintah yang sangat penting bagi masyarakat miskin termasuk pada masyarakat yang ada di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Terkait dengan permasalahan pokok penelitian ini yakni faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?, maka berikut ini akan diuraikan secara teoritis sejumlah indikator-indikator untuk mengukur variable efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), antara lain :

1. Pemahaman sumber daya pelaksana kegiatan P2DTK.
2. Kemampuan mengkomunikasikan kegiatan P2DTK.
3. Keaktifan masyarakat dalam merencanakan P2DTK.
4. Kemampuan merealisasikan P2DTK sesuai rencana yang ditetapkan

### 1. Pemahaman sumber daya pelaksana kegiatan P2DTK.

Dari hasil analisa data dengan menggunakan tabel frekuensi tentang pemahaman sumber daya dalam pelaksanaan P2DTK tanggapan responden dikategorikan kurang sekali, dari jawaban responden dapat ditegaskan bahwa upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembangunan di daerah tertinggal, sudah seharusnya lebih dioptimalkan baik itu melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan program dimaksud maupun melalui sosialisasinya secara terus menerus sehingga masyarakat benar-benar memahaminya serta bersedia mendukung program dimaksud.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan program ini diperkuat dengan jawaban responden masyarakat

yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang program tersebut, karena memang tidak pernah ada informasi tentang itu. Selain itu, oleh responden lainnya mengatakan kami mengetahui tentang program P2DTK ini setelah ada kerjanya. Tapi tentang informasinya tidak pernah kami terima baik dari pemerintah desa maupun kecamatan, apalagi dari mereka yang ditugaskan oleh instansi terkait yang ada di kabupaten ini. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Negeri Hila, Juni 2013)

Pemahaman yang kurang dan informasi yang minim tentang Program P2DTK ini dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk lebih intens memperkenalkan program P2DTK ini kepada masyarakat baik itu dilakukan melalui penyuluhan ataupun penyebaran informasi secara langsung melalui rapat kerja di tingkat kecamatan ataupun di level di desa sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang program dimaksud yang berimplikasi positif terhadap kepentingan masyarakat desa maupun kecamatan pada umumnya.

## 2. Kemampuan mengkomunikasikan kegiatan P2DTK.

Hasil analisa data tentang kemampuan mengkomunikasikan kegiatan P2DTK yang dilakukan menggunakan Tabel Frekuensi, tanggapan responden dikategorikan kurang baik, menurut responden komunikasi tentang kegiatan P2DTK di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Leihitu belum berjalan secara intensif. Karena itu banyak pengakuan masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan P2DTK yang berlangsung di desa-desa tersebut diketahui setelah program tersebut dilaksanakan di desanya, namun tidak pernah sama sekali mereka di undang dalam rapat desa untuk membahas program ini. (hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Leihitu, Mei – Juni, 2013)

Permasalahan kurang dikomunikasikannya program P2DTK kepada masyarakat kiranya berimplikasi pada banyaknya kegiatan yang tidak diketahui secara baik oleh masyarakat. Untuk itu masyarakat, sangat mengharapkan agar program ini dapat di komunikasikan dengan baik oleh pihak pengelola sehingga berbagai program yang dicanangkan dapat diterima dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, serta dapat memudahkan masyarakat untuk memahami tujuan dan sasaran P2DTK yang akan berlangsung di desanya.

### 3. Keaktifan masyarakat dalam merencanakan P2DTK.

Sementara itu hasil analisa data tentang Keaktifan masyarakat dalam merencanakan P2DTK yang dilakukan menggunakan Tabel Frekuensi, tanggapan responden dikategorikan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan program P2DTK baik itu pada tingkat kecamatan maupun desa. Tanggapan responden diatas menunjukkan bahwa, pada dasarnya sebagian besar masyarakat di Kecamatan Leihitu tidak pernah menerima atau mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan program ini, termasuk mendapatkan kesempatan untuk membahas rencana pelaksanaan program P2DTK pada level kecamatan. maupun desa, sehingga program ini baru diketahui setelah akan diimplementasikan secara riil di desanya.

Hal ini seharusnya perlu dibenahi sedini mungkin mulai dari tahapan memperkenalkan program P2DTK dalam bentuk melakukan penyuluhan, sosialisasi dan mengkomunikasikan program tersebut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan mereka dan bahkan aktif untuk membahas dan merencanakan kegiatan pendukung program ini sesuai aspirasi atau sesuai kebutuhan masyarakat yang ada.

### 4. Kemampuan merealisasikan P2DTK sesuai rencana yang ditetapkan

Selanjutnyakemampuan merealisasikan Program P2DTK sesuai dengan rencana yang ditetapkan setelah dianalisis menggunakan tabel frekuensi jawaban responden terhadap indicator tersebut menurut penulis cukup realistis karena ada sebagian yang mengatakan kemampuan melakukan proses realisasi program P2DTK dinilai cukup baik walaupun belum terlalu maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.seperti terlihat pada wawancara berikut : hasil wawancara (Mei – Juni 2013) ;

Harapan kami sebagai masyarakat agar semua kegiatan pembangunan yang terkait dengan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan haruslah kami ketahui termasuk dengan pelaksanaan program P2DTK ini,

sehingga kami merasa memiliki program tersebut dan merasa puas dengan hasil yang dicapai.

Bagaimana kami akan memberi dukungan sementara informasi program ini tidak pernah kami peroleh dan tidak mengetahui maksud, tujuan bahkan bentuk kegiatannya. Kami dapat mengetahui setelah ada kegiatannya di desa kami.

Pengelola program ini dalam tahapan pembahasan, perencanaan dan penetapan daerah sasarannya lebih cenderung bersifat top down sehingga kami aparatur pemerintah desa hanya mengetahui setelah mengikuti rapat di kecamatan. Hal ini tentunya berpengaruh pada rendahnya dukungan masyarakat pada tahap implementasinya.

Pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam (Pasir, Batu dan bahan bangunan lainnya) di setiap desa tidak dimanfaatkan dengan baik. Pengelola program dan penanggungjawab program di lapangan cenderung mendatangkan dari luar desa jika dianggap mahal untuk mendapatkannya dari desa tersebut dimana program ini dilaksanakan.

Dengan demikian, kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa upaya pemerintah melalui kegiatan percepatan pembangunan dalam kaitan dengan pelaksanaan program kegiatan P2DTK yang ditujukan untuk membangun, menangani dan mengendalikan bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta menanggulangi masalah keterlambatan pembangunan di daerah tertinggal utamanya desa-desa dalam wilayah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, kurang atau belum terlaksana dengan baik sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini di desanya kurang diperoleh sesuai harapan. Kondisi ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini dimana rendah upaya pendekatan percepatan pembangunan melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memperbaiki kondisi wilayah daerah tertinggal dalam wilayahnya.

### C. PENUTUP

Dari hasil analisa datadan pembahasan, maka disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK ) di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah masih kurang efektif atau belum sesuai dengan harapan masyarakat di kecamatan ini, dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan program P2DTK di kecamatan Leihitu, dinilai belum terproses dengan baik, mulai dari kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian dan Pengendalian, sehingga banyak kegiatan yang kurang efektif.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antara pelaksana P2DTK denganAparatPemerintah Kecamatan terutama dengan Pemerintah desa termasuk masyarakat atas berbagai informasi mengenai pelaksanaan Program P2DTK secara periodik, berjenjang dan terpadu.
3. Pelaksana atau Pengelola Program dianggapkurang mengkomunikasikan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan baik, sehinggaberimplikasi pada minimnya tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Leihitu untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan program P2DTK yang akan dilaksanakan di desa-desa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan untuk daerah tertinggal dan khusus.
2. Program ini harus lebih memanfaatkan dan menggunakan sumber daya manusia lokal dimana program P2DTK ini dilaksanakan serta mengkomunikasikan secara aktif kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam



mendukung pelaksanaan program P2DTK khususnya di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Roro Mas Lilik., 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Cakra, Surabaya.
- Menkokesra, Surat Keputusan Nomor 23/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang pengendali program pemberdayaan masyarakat, Di Dwounload dari situs [www.Kesraindo.stanford.edu](http://www.Kesraindo.stanford.edu)
- Reskianto, 2003. *Manajemen Kependidikan*. Penerbit Mega Abdi Sentosa, Bandung.
- Steers, Richard, 1989. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Stoner, George, 1982. *The Organization Effectivity in Concept and Theoretic*. Published by John Wiley and Sons, California.
- Subyono, Kasmanto, 2005. *Perilaku Organisasi*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Sumatri, Latif, 2006. *Manajemen Organisasi Praktis*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Suwarto, Hadi, 1999. *Mewujudkan Organisasi yang Efektif*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Steers, Richard, 1989. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- West-Burnharm, 1997. *The Effectivity Organization in Quality Management*. Published by Boston University Press.